

ASKRINDO LUNCURKAN BUKU MEMBANGUN

GENERASI EMAS INDONESIA

Direktur Utama PT Askrindo Priyastomo (kanan) dan Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono (kiri) berfoto bersama pada peluncuran buku TJSL "Membangun Generasi Emas Indonesia" di Graha Askrindo, Jakarta, Selasa (6/6). Buku "Membangun Generasi Emas Indonesia" merupakan komitmen nyata Askrindo untuk Indonesia yang telah melakukan beberapa program kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) antara lain meningkatkan kompetensi guru PAUD, penghargaan kepada Guru PAUD khususnya di daerah 3T.



Ini Upaya Pemerintah Indonesia Transformasi Ekonomi Hijau

Sri Mulyani menjelaskan beberapa terobosan dari kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mentransformasikan menuju ekonomi hijau. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menyiapkan dua instrumen dalam menggunakan mekanisme pasar dalam mengakselerasi transformasi ekonomi hijau.

JAKARTA (IM) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa adanya kesadaran masyarakat dunia terhadap ancaman perubahan iklim menjadi kesempatan bagi Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan determinasi untuk melakukan transformasi ekonomi. Hal ini disampaikannya dalam Webinar Green Economy Forum 2023 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia, Selasa (6/6).

"Indonesia akan terus memanfaatkan momentum global dan juga pada saat yang sama melakukan transformasi ekonomi kita sendiri menuju ekonomi yang makin hijau," ungkap Sri Mulyani di laman

Kemenkeu.

Ia menjelaskan beberapa terobosan dari kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mentransformasikan menuju ekonomi hijau. Salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang menyiapkan dua instrumen dalam menggunakan mekanisme pasar dalam mengakselerasi transformasi ekonomi hijau.

"Pertama menggunakan instrumen perdagangan, yaitu sistem perdagangan karbon yang sifatnya mandatory dan mekanisme *offsetting*. Dan yang kedua adalah instrumen yang basisnya non perdagangan. Dalam hal ini di-introduce instrumen *result based payment*

artinya suatu program yang bisa mendeliver penurunan CO2 mereka kemudian bisa mendapatkan kompensasi result base payment dan juga pajak karbon," jelas Sri Mulyani.

Selanjutnya dengan menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 yang mengatur penyelenggaraan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik. Menkeu mengatakan, saat ini lebih dari 86% total Pembangkit Listrik Tenaga Uap berbasis batu bara yang mengikuti emission trading system ini. Dari sisi pajak karbon yang sudah diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak kar-

bon minimal Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen.

Pemerintah juga membentuk beberapa instrumen dan kelembagaan. Diantaranya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang mengelola dan memperkenalkan market carbon di Indonesia dan dihubungkan dengan market carbon dunia, SDG Indonesia One yang dikelola PT SMI yang menjadi jembatannya mobilisasi pembiayaan untuk transformasi hijau, dan Indonesia Investment Authority yang bertujuan untuk menciptakan masuknya modal investasi di sektor hijau.

Indonesia juga termasuk negara berkembang pertama yang menerbitkan *sovereign* sukuk green di pasar dunia.

Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan instrumen pembiayaan hijau melalui green sukuk yang sifatnya retail.

"Komitmen Indonesia untuk melakukan transisi adalah sesuatu yang perlu didukung oleh semua pihak dan ini perlu kerja keras pada level detail dan strategis dari sisi kemampuan untuk mendapatkan manfaat dan pada saat yang sama tetap konsisten menurunkan CO2. Dengan berbagai langkah langkah ini, Indonesia tetap akan menyampaikan bahwa transisi untuk menuju ekonomi hijau harus adil dan juga harus affordable," pungkask Sri Mulyani. • dro

OJK Catat Pasar Modal Himpun Dana Rp102 Triliun

JAKARTA (IM) - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi melaporkan pasar modal Indonesia berhasil menghimpun dana senilai Rp102,10 triliun hingga periode Mei 2023.

"Penghimpunan dana di pasar modal di Mei masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp102,10 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 35 emiten," ujar Inarno dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisiner Bulanan (RDKB) OJK di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (6/6).

Dalam pipeline (antrian), pihaknya mengungkapkan masih terdapat 117 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar Rp139,29 triliun, dengan rencana Initial Public Offering atau IPO oleh perusahaan baru sebanyak 63 perusahaan.

Sementara itu, untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF)

yang merupakan alternatif pendanaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Ia menyebut hingga 31 Mei 2023 terdapat 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 404 penerbit, 153.662 pemodal, dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp869,47 miliar.

Namun demikian, di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan akibat sentimen negatif global, Inarno mengungkapkan pasar saham Indonesia periode Mei 2023 melemah 4,08 persen month to date (mtd) ke level 6.633,26, dari sebelumnya periode April 2023 menguat 1,62 persen (mtd) ke level 6.915,72.

Secara year to date (ytd), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sebesar 3,17 persen (ytd), dengan non-resident membukukan net buy sebesar Rp20,58 triliun, dari sebelumnya periode April 2023 membukukan net buy sebesar 18,91 triliun (ytd).

Sejak 1 Januari sampai dengan 25 Mei 2023, pihaknya telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus kepada 14 pihak dalam rangka menegakkan hukum di pasar modal Indonesia.

Adapun, 14 pihak tersebut terdiri dari satu pencabutan izin dan 13 peringatan tertulis, serta mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp5,24 miliar kepada 99 pelaku jasa keuangan di pasar modal Indonesia.

Inarno juga mengungkapkan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode Mei 2023 ditopang oleh saham sektor energi dan basic materials (barang baku). "Pelemahan IHSG didorong pelemahan saham di sektor energi dan basic materials yang sejalan dengan perkembangan harga komoditas," ujar Inarno. • dot

Pemerintah Dorong Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

JAKARTA (IM) - Pencapaian target pembangunan berkelanjutan terus menjadi prioritas utama Pemerintah sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan iklim global melalui penerapan ekonomi hijau hingga saat ini. Upaya tersebut ditunjukkan Pemerintah melalui komitmen dalam mendorong penyediaan sumber daya yang optimal guna mengakselerasi transisi energi berkelanjutan.

Dalam International Seminar Leveraging Performance Audit Impact Towards Green Economy, Selasa (6/6), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwiwo Moegiarso menerangkan bahwa komitmen Indonesia dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tersebut juga ditunjukkan dengan meningkatkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada *National Determined Contributions* (NDC) yang menggunakan kemampuan sendiri sebesar 29% menjadi 31,89% dan dengan dukungan internasional sebesar 41% menjadi 43,20%.

"Mempromosikan ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan merupakan suatu keharusan untuk kebaikan global. Selain itu, kita juga harus berfokus untuk merangkul setiap peluang guna mencapai transisi yang adil dan terjangkau," ungkap Susiwiwo dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Selasa (6/6).

Lebih lanjut, komitmen Pemerintah tersebut juga diwujudkan dalam berbagai upaya mulai dari memperkuat kolaborasi sektor swasta, mendorong pembiayaan inovatif dengan membentuk *Sovereign Wealth Fund*, melakukan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan, serta berkontribusi dalam *Just Energy Transition Partnership* dengan meluncurkan Rencana Investasi Komprehensif sebesar USD20 miliar.

Selain itu, guna mempromosikan transisi hijau dari sisi permintaan, Pemerintah juga memberikan insentif untuk mempercepat sektor bisnis energi terbarukan dan ramah lingkungan, seperti pembebasan pajak dan tunjangan, pembebasan bea masuk, dan pengurangan PPN dan pajak barang mewah, penetapan tarif pajak berdasarkan emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar, serta insentif untuk pembelian kendaraan listrik.

Di samping berbagai kebijakan tersebut, strategi pengelolaan fiskal yang optimal juga perlu menjadi fokus Pemerintah untuk memobilisasi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, Sesmenko Susiwiwo juga menuturkan bahwa lembaga audit Pemerintah turut memiliki peran penting dalam memastikan pemanfaatan pembiayaan guna mendorong transisi ekonomi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan dengan tepat sasaran. • pan



PRODUKSI SEPATU KULIT ECOPRINT DI MALANG

Perajin menunjung bahan baku pembuatan sepatu berupa kulit sapi yang dicetak dengan teknik ecoprint di rumah produksi Madocci Shoes, Purwantoro, Malang, Jawa Timur, Selasa (6/6). Sekitar 40 pasang sepatu kulit ecoprint hasil produksi per bulan dipasarkan melalui media sosial ke berbagai kota di Indonesia dan mancanegara dengan harga Rp350 ribu hingga Rp2 juta tergantung kesulitan pembuatannya.

BPR SUPRA

PULAUINTAN
General Contractor

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

Pupuk Kaltim Targetkan Pabrik Soda Ash Beroperasi Akhir 2026

JAKARTA (IM) - Anak usaha Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) atau PKT menargetkan pabrik soda ash yang dibangun di Bontang, Kalimantan Timur, mulai beroperasi secara komersial pada triwulan IV 2026.

Direktur Operasi dan Produksi PKT Hanggara Patrianta dalam media briefing bertajuk "Soda Ash, Strategi PKT dalam Transformasi Industri Hijau dan Dukung Indonesia Net Zero Emission 2060" di Jakarta, Selasa (6/6) menjelaskan, soda ash memiliki potensi pasar yang besar di dalam negeri menyusul masih tingginya impor untuk memenuhi kebutuhan domestik.

"Dengan pemintaan pasar soda ash di Indonesia yang hampir mencapai 1 juta metrik ton per tahun (MTPY), saat ini belum memiliki pabrik soda ash. Karena itu kami ingin menjadi salah satu pelopor untuk mengurangi impor dengan menyiapkan soda ash produksi dalam negeri," katanya.

Hanggara mengatakan pada 2022 lalu impor soda ash untuk kebutuhan domestik mencapai 916.000 MTPY dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 1,2 juta MTPY pada 2030.

"Dengan dibangun pabrik soda ash ini tentunya akan berdampak pada penurunan impor soda ash dan dengan menerapkan praktik ekonomi sirkular, PKT memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan

potensi by dari proses hasil produksi untuk dimanfaatkan menjadi produk turunan yang bernilai tambah," katanya.

Hanggara berharap pabrik berkapasitas produksi soda ash sebesar 300.000 MTPY itu akan dapat mensubstitusi sekitar 30 persen impor kebutuhan soda ash nasional.

Ketua Tim Persiapan Proyek Soda Ash PKT Wildan Hamdani menjelaskan investasi pabrik soda ash mencapai sekitar 200 juta dolar AS atau setara Rp3 triliun. Soda ash sendiri merupakan bahan baku utama pembuatan kaca, keramik, deterjen, kimia, tekstil dan kertas. Adapun bahan baku soda ash ada tiga, yaitu ammonia, CO2 dan garam industri.

Wildan menjelaskan bahan baku berupa ammonia dan CO2 didapatkan dari internal PKT. Bahan baku CO2 merupakan hasil emisi pabrik dan ammonia sebagai by product pembuatan urea. Sementara kebutuhan garam industri diupayakan agar bisa dipenuhi oleh industri lokal apabila spesifikasinya terpenuhi.

Secara angka, untuk produksi soda ash dibutuhkan 105.000 MTPY ammonia, 174.000 MTPY CO2 dan 345.000 MTPY garam industri. Selain menghasilkan produk utama soda ash, pabrik tersebut juga menghasilkan produk sampingan ammonium chloride sebesar 300.000 MTPY yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dan bahan baku NPK. • hen

PNBP ESDM Capai Rp125 T

JAKARTA (IM) - Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencapai Rp125,9 triliun hingga Mei 2023. Capaian tersebut 57,3% dari target tahun ini.

"Angka Rp32,9 triliun ini sebetulnya angka per Maret 2023, diangka triwulan 3. Jadi angka sekarang ini sektor ESDM sudah memberikan kontribusi terhadap APBN sebesar Rp125,9 T sampe akhir mei dari targetnya Rp219,58 triliun," kata Plt Sekretaris Jenderal Dadan Kusdiana dalam Rapat Dengar Pendapat Eselon I Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (6/6).

Dadan menuturkan bahwa realisasi anggaran belanja Kementerian ESDM sebesar 21,15 persen dari pagu Rp6,55 triliun di tahun 2023 itu masih sesuai dengan target yang direncanakan. Namun, Dadan menyebutkan bahwa masih adanya blokir anggaran yang cukup besar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan.

"Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya khususnya kegiatan clean cooking untuk rumah tangga, dan juga Ditjen EBTKE untuk kegiatan PJUTS dan Ditjen Migas untuk kegiatan konkrit nelayan dan petani," tandasnya. • hen

FOTO:ANTARA